



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rencana Kerja 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2022 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kutai Kartanegara



Ir. H. BAHTERAMSYAH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620327 198603 1 023

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Landasan Hukum2

 1.3. Maksud dan Tujuan4

 1.4. Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
 Capaian RENSTRA-PD6

 2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kab. Kutai Kartanegara21

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi
 Dan Informatika24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas	
Komunikasi dan Informatika	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan	
Informatika.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
4.1. Program dan Kegiatan	51
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap

memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2020, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2021, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal beberapa faktor antara lain dikarenakan Pandemi covid 19. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2020 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah sebesar **16,00%**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar **50,00%**

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

- a. Integritas Data Layanan sebesar **50%**
- b. Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network Security) **35%**
- c. Pameran Pembangunan **50%**

4. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi

- a. Pengelolaan Media Internal **40%**
- b. Pengelolaan Acara Interaktif **31,25%**

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat Sebesar **96,57%**
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar **100%**
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar **86,36%**
- d. Penyediaan jasa Administrasi Teknis dan Perkantoran sebesar **100%**
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar **100%**
- f. Penyediaan alat tulis kantor sebesar **100%**
- g. Penyediaan makanan dan minuman sebesar **60,87%**
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar **74,07%**
- i. Penataan Arsip Perangkat Daerah sebesar **100%**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor **66,67 %**
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar **100%**
- c. Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan Radio **100%**
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar **100%**

3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai

- a. Pengadaan Pakaian Sipil Harian sebesar **100%**
- b. Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu **100%**

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Fasilitasi Tim BEKIAS **100%**

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev sebesar **100%**
- b. Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah **100%**
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir sebesar **100%**
- d. Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar **100%**

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

- a. Pengklasifikasian Data Sistem Informasi sebesar **100%**
- b. Penyediaan Bandwith sebesar **100%**
- c. Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT **100%**
- d. Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mekanikal Elektrikal **100%**
- e. Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK **90%**
- f. Implementasi Smart Regency / City **100%**
- g. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi) **133,33%**
- h. Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah **100%**
- i. Fasilitasi Pengelolaan Opini Publik **100%**
- j. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Komunikasi dan Informatika **100%**
- k. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik **100%**
- l. Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **100%**

7. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi

- a. Pengeloalaan Program Siaran dan Konten **100%**
- b. Fasilitasi Komunikasi OPD dan Pertemuan Reguler FKPD serta antar OPD dan Media Massa **72,41%**
- c. Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF) **100%**
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) **102,25%**
- e. Fasilitasi Forum Komunikasi melalui BAKOHUMAS **100%**

8. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- a. Diseminasi Blocking Space / Time melalui Media Massa **100%**
- b. Pengelolaan Media monitoring dan Advetorial **100%**
- c. Pembuatan Media Informasi Profil Daerah **100%**
- d. Fasilitasi Peliputan Kegiatan Kepala Daerah **100%**

9. Program Pengembangan Data/informasi/Statistik

- a. Fasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral **94%**
- b. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah **100%**
- c. Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara **100%**

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Penetration testing(pentes) aplikasi dan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) **100%**
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian **100%**
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara **100%**

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

- a. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi) **133,33%**

2. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi 3,35%

- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) **102,25%**

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

- 1) Terjadinya Pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan perencanaan
- 2) Terjadinya Rasionalisasi Anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
- 3) Masih Kurangnya SDM baik di Bidang IT maupun di Bidang Layanan Publik
- 4) Adanya perubahan kebijakan maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan pandemic covid 19

5) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

6) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Perlunya telaahan Program/Kegiatan yang menjadi Prioritas
- Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Peningkatan Kualitas Jaringan
- Pengadaan SDM baru khususnya SDM bidang IT
- Perlunya sosialisasi dan koordinasi OPD terkait integrasi dan pengembangan Aplikasi
- Penguatan Mobilitas Pembinaan KIM, Peningkatan kualitas SDM Kim melalui pelatihan dan Bimtek
- Perlunya menjangkau semua media sebagai mitra pemerintah melalui sumber daya yang tersedia
- Perlunya Sosialisasi dan Bimtek / Pelatihan terkait Data Statistik Sektoral

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
						Target Renja - PD tahun (2020)	Realisasi Renja - PD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	500	300	100	100	100,00	100	500	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Lembar	3.438	1.758	825	800	96,97	825	3.383	98,40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan air dan listrik	Bulan/Rekeni ng	276	213	12	12	100,00	12	237	85,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas	Unit	125	74	22	19	86,36	22	115	92,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis kebersihan kantor	Bulan/Jenis	99	49	25	25	100,00	25	99	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan administrasi keuangan	Bulan/orang	136	75		-	-	61	136	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis	222	42	90	90	100,00	90	222	100,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Lembar	213.005	73.005	70.000	51.850	74,07	70000	194.855	91,48
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kotak	15.750	9.719	3.000	1.826	60,87	3000	14.545	92,35
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	Kali	490	190	150	24	16,00	150	364	74,29
	Penyediaan Jasa Adm Teknis dan Perkantoran	Jumlah adm teknis perkantoran	orang	1.044	908	75	61	81,33	61	1.030	98,66
	Penyediaan Bandwith	MBps	Mbps	490	490	-	-	-	0	490	100,00
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Dokumen	58	-	58	58	100,00	0	58	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	95	95	94	95	100,00	94,50	284	300,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan	Bulan	36	12	12	8	66,67	12	32	88,89
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	Jenis	132	69	20	10	50,00	0	79	59,85
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	114	53	28	28	100,00	28	109	95,61
	Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara	Paket	2	-	1	1	100,00	1	2	100,00
	Sewa Disaster Recovery center (DRC)	Jumlah TeraByte (TB)	TeraByte (TB)	0	0	-	-	-	0	0	100,00

	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	SKPD/Kecamatan	176	176	-	-	-	0	176	100,00
	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mechanical Elektrikal	Jumlah kecamatan yang terpelihara	Kecamatan/tower	62	62	-	-	-	0	62	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Bulan	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	200	100			-	100	200	100,00
	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pelanggaran disiplin	Persen	-	-	-	-	-	0	-	-
	Pengadaan Pakaian Sipil Harian	Jumlah Pakaian Sipil Harian	Stel	168	-	84	84	100,00	84	168	100,00
	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	Stel	168	-	84	84	100,00	84	168	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Kinerja SKP	Persen	88	88	88	88	-	87,65	87,65	-
	Pelatihan, Kursus dan Bimtek PNS/PPPK	Jumlah ASN	Orang	70	-	35	-	-	35	35	50,00
	Fasilitasi Tim BEKIAS	Jumlah ASN	Orang	56	16	20	20	100,00	20	56	100,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	500	300	100	100	100,00	100	500	100,00
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan ,	Jumlah dokumen	Bulan/Dokumen	37	20	12	12	100,00	5	37	100,00

	Laporan Kinerja dan Monev										
	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	8	8			-		8	100,00
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	Laporan Kinerja	12	-	12	12	100,00	0	12	100,00
		Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset		500	300	100	100	100,00	100	500	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Jumlah berkas laporan keuangan	Berkas	6	2	2	2	100,00	2	6	100,00
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan BMD	4	-	4	4	100,00	0	4	100,00
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit		500	300	100	100	100,00	100	500	100,00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi	Persen	64	17	46	38	82,51	64,10	119	185,30
	Integrasi Data Layanan	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	32	3	2	1	50,00	28	32	100,00
	Pengklasifikasian Data Sistem Informasi	Jumlah Data Sistem Informasi	Aplikasi	9	-	4	4	100,00	5	9	100,00
		Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Persen	100	90	90	90	100,12	100	281	280,60

	Penyediaan Bandwith	Jumlah MBps	Mbps	600	-	300	300	100,00	300	600	100,00
	SMS Gateway dan Broadcast Message	Jumlah Sms dan Call Center	SMS	2.500	-	-	-	-	2500	2.500	100,00
	Sewa VVN-IP	Jumlah Lokasi	Mbps	3	-	-	-	-	3	3	100,00
	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	Jumlah OPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	OPD	200	-	100	100	100,00	100	200	100,00
	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mechanical Elektrikal	Jumlah kecamatan yang terpelihara	Kecamatan	36	-	18	18	100,00	18	36	100,00
	Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK	Jumlah Akses Jaringan	Lokasi	46	-	10	9	90,00	21	30	65,22
		Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif	Persen	100	100	100	100	100,00	100	300	300,00
	Implementasi Smart Regency / City	Jumlah Layanan	Layanan	6	2	2	2	100,00	2	6	100,00
	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	9	3	3	4	133,33	3	10	111,11
	Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network Security)	Jumlah Peserta	Peserta	40	-	20	7	35,00	20	27	67,50
	Penilaian dan Standarisasi E-Government Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai	OPD	60	-	30	30	100,00	30	60	100,00
	Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi LPSE	Jumlah Peserta	Orang	350	350	-	-	-	0	350	100,00
	Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	Dokumen/Aparatur OPD	56	56	-	-	-	0	56	100,00

		Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Persen	100	38	62	56	90,22	100	194	193,93
	Fasilitasi Pengelolaan Opini Publik	Jumlah Kerjasama Pengelolaan Opini Publik	Surat Perjanjian Kerjasama	4	-	2	1	50,00	2	3	75,00
		Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Fasilitas	10	-	5	5	100,00	5	10	100,00
		Jumlah Dokumen Uji Konsekuensi Informasi Publik	Dokumen	10	-	5	5	100,00	5	10	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peserta	Orang	150	-	75	75	100,00	75	150	100,00
	Publikasi Kepala Daerah	Jumlah Publikasi	Tahun	1	1	-	-	-	0	1	100,00
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	Dokumen	48	-	24	24	100,00	24	48	100,00
	Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah PPID / PPID Pembantu	Unit	116	-	58	58	100,00	58	116	100,00
	Implementasi PPID Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan	Pelaksanaan	6	6	-	-	-	0	6	100,00
	Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran	Pameran	4	-	2	1	50,00	2	3	75,00
	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Persen	100	5	94	94	100,35	100	199	199,27
	Pengelolaan Program Siaran dan Konten	Jumlah Konten Radio	Konten Radio	480	-	240	240	100,00	240	480	100,00

		Jumlah Konten Streaming	Konten Streaming		-	240	240	100,00	240	480	-
		Jumlah Konten Video	Konten Video		-	240	58	24,17	240	298	-
	Peningkatan Fasilitas Radio Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Audio	Set	1	-	-	-	-	1	1	100,00
	Fasilitasi Komunikasi OPD dan Pertemuan Reguler FKPD serta antar OPD dan Media Massa	Jumlah OPD terfasilitasi	OPD	116	-	58	42	72,41	58	100	86,21
	Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	Jumlah komunitas Masyarakat	Komunitas Masyarakat	5	2	1	1	100,00	2	5	100,00
	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina	KIM	444	-	222	227	102,25	222	449	101,13
	Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah KIM yang terbina	KIM yang terbina	2	3	-	-	-	0	3	150,00
	Pengelolaan Media Internal	Jumlah Media Internal (Internet, Radio, Televisi, Media Sosial)	Media	10	-	5	2	40,00	5	7	70,00
	Pengelolaan Acara Interaktif	Jumlah Acara Interaktif	Event	54	-	48	15	31,25	6	21	38,89
	Fasilitasi Forum Komunikasi melalui BAKOHUMAS	Jumlah Forum yang terfasilitasi melalui BAKOHUMAS	Forum	5	-	1	-	-	4	4	80,00
		Jumlah Regulasi Kehumasan Pemerintah	Dokumen	-	-	1	1	100,00	1	2	-

	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media soisal	Persen	331	300	100	100	100,00	100	500	151,04
	Diseminasi Blocking Space / Time melalui Media Massa	Jumlah Mitra Media	Media	6	-	3	3	100,00	3	6	100,00
	Diseminasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Melalui Blocking Space	Jumlah Media	Media	15	4	-	-	-	0	4	26,67
	Publikasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Media Informasi yang tersedia	Media Informasi	5	5	-	-	-	0	5	100,00
	Pengelolaan Media monitoring dan Advetorial	Jumlah Mitra Media	Media	65	-	35	35	100,00	30	65	100,00
	Pembuatan Media Informasi Profil Daerah	Jumlah Media Informasi	media	7	-	1	1	100,00	6	7	100,00
	Fasilitasi Peliputan Kegiatan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kepala Daerah	Tahun / Kegiatan	600	30	200	200	100,00	200	430	71,67
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik	Cakupan Data Statistik Daerah	Persen	400	200	100	100	100,00	100	400	100,00
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	-	-	-	0	1	100,00
	Fasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Peserta Rakor	Orang	600	150	300	110	36,67	300	560	93,33
		Persentase Ketersediaan Data OPD	Persen	116	58	58	47	81,03	58	163	140,52

		Jumlah Regulasi	Dokumen		1	1	-	-	1	2	-
	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	2	1	1	100,00	1	4	100,00
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	2	-	-	-	1	3	100,00
	Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi yang telah diproteksi	Persen	23	5	8	-	-	10,25	16	67,03
	Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	12	4	4	4	100,00	4	12	100,00
		Jumlah MOU	MOU	2	-	1	1	100,00	1	2	100,00
	Kerjasama IT Security Assesment Lemsaneg	Jumlah MOU	MOU	-	-	-	-	-	0	-	-
	Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi	OPD	2	-	1	1	100,00	1	2	100,00
	Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	Jumlah Peralatan Sandi Negara	Unit	12	-	6	6	100,00	6	12	100,00
	Pengembangan dan Peningkatan Akselerasi SIMRAL pada NOC	Jumlah Data Layanan	Data Layanan OPD	2	1	-	-	-	1	2	100,00

	Pengembangan dan Peningkatan Data Center	Jumlah Data Layanan	Data Layanan OPD	1	1	-	-	-	0	1	100,00
--	--	---------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			94,50	94,47	94,47	94,47	94,50	-	94,47	94,47	
3	Jumlah pelanggaran disiplin			-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rata-rata Nilai Kinerja SKP			87,57	87,21	90,00	95,00	87,21	-	90,00	95,00	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
6	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
7	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
8	Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi			46,05	64,10	70,00	75,00	38,00	-	70,00	75,00	
9	Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan			90,20	100,00	100,00	100,00	90,30	-	100,00	100,00	
10	Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	

11	Cakupan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik			62,07	100,00	100,00	100,00	56,00	-	100,00	100,00	
12	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM			93,67	100,00	100,00	100,00	94,00	-	100,00	100,00	
13	Cakupan advertorial di media elektronik, cetak dan media soisal			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
14	Cakupan Data Statistik Daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
15	Persentase aplikasi yang telah diproteksi			7,89	10,00	30,00	50,00	-	-	30,00	50,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

a) Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara SmartCity.

Secara garis besar pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangnya membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintegrasikan data layanan informasi.

b) Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam membangun/mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan masing masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi di setiap SKPD.

Integrasi data merupakan sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung management Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan sumber data yang sama yang sudah terverifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

c) Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.

d) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

e) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat teknologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data digital secara

jarak jauh melalui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salah satu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Kurangnya Sumber Daya Spesifik IT (Programmer, Engineer Network / Hardware / System, Quality Control)
- Kondisi Infrastruktur IT yang sebagian besar sudah berumur diatas umur Teknis (10-15 tahun)
- Belum tersedianya Sistem Keamanan Informasi
- Belum Terstandarisasinya Perangkat Lunak dan Terintegrasinya Aplikasi (Sistem dan Database)
- Belum terwujudnya Fungsi Wali Data (Informasi Satu Data)
- Belum terwujudnya fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kada, Cpaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;			

1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan 2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah 3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT 4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi 4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Unggul dan Berbudaya			

1	Program Keluarga Peduli Kesehatan	Belum adanya aplikasi yang mendukung kebijakan pemberian BPJS bagi warga pra sejahtera	BELUM ADANYA BISNIS PROSES MAUPUN DATABASE WARGA PRA SEJAHTERA.	1. TERSEDIAANYA APLIKASI E-WARGA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN UNTUK Mendukung Kebijakan Pemberian BPJS Bagi Warga PRA SEJAHTERA; 2. TERSEDIAANYA API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) DARI DISDUKCAPIL YANG DAPAT DIMANFAATKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM Mendukung Kebijakan Pemberian BPJS Bagi Warga PRA SEJAHTERA BERBASIS NIK.
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempunyai, sehingga pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Belum optimalnya pendataan Statistik Sektoral

Adapun Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Adanya peluang recruitment SDM IT
- Adanya peluang peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Adanya peluang optimalisasi Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektoral secara komperhensif

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dari penjabaran isu – isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- Perlunya Recruitment Sumber Daya Spesifik IT
- Revitalisasi Infrastruktur dan Perangkat Keras IT serta Penerapan Pengamanan Sistem Informasi
- Membuat Regulasi tentang Standarisasi Perangkat Lunak dan Keras serta Perlakuan Integrasi Sistem dan Database
- Membangun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara Komperhensif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2022

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara tahun 2022 pada tabel dibawah ini :

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisa Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat;	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 60 (B	16.601.827.266	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat;	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 60 (B	15.984.481.540	
			2) Persentase Pengelolaan, Penata an, Penertiban dan Penelusuran Aset Daerah; 3) Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP; 4) Persentase Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 5) Persentase Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 6) Predikat Tata Kelola Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika	2) Persentase Pengelolaan, Pena taan, Penertiban dan Penelusuran Aset Daerah; 3) Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP; 4) Persentase Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 5) Persentase Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 6) Predikat Tata Kelola Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika								

	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	21 Dokumen	252.005.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	200.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	100.393.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	151.611.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	10.745.619.642	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.006.217.716	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.434.327.478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium	12 Bulan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	311.292.164	

			Jumlah Laporan	3 Dokumen							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	4 Dokumen	176.448.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan BMD	4 Dokumen	176.448.800	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	125.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi kepegawaian	2 Layanan	290.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN	15 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	15 Orang	150.000.000	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	20 Orang	140.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	-	-	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum	5 Layanan	470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	45 Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45 Jenis	100.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1500 Kotak	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	50.000.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Cetak dan Penggandaan	70000 Lembar	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	70.000 Lembar	50.000.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	70 Kali	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2.100 Orang/Kali	200.000.000	
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah arsip	35 Arsip	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	70.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Layanan	1.016.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Paket	600.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	250.000.000	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Jenis	416.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	48 Dokumen	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	5.100.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekening	36 Rekening	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	742.000.000	

17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang / Bulan	816 Orang / Bulan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	1. Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.254.363.824	
			Jumlah penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Layanan				2. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Layanan	649.690.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kendaraan dinas	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	131.800.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Bangunan	167.890.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	9.400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.605.357.334	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	9.400.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.334	
21	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	550.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	300.000.000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan		
22	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	50 Dokumen	300.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	200.000.000	
23	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Konten yang dikelola	720 konten	600.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Konten Video yang dikelola	120 Konten Video	300.000.000	

								Jumlah Konten Streaming yang dikelola	120 konten Streaming		
								Jumlah Konten Radio yang dikelola	120 konten Radio		
24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	50 orang	250.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	120 Orang	250.000.000	
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertemuan	6 pertemuan	300.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	300.000.000	
26	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang dibina	200 Orang	300.000.000	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang dibina	200 Orang	300.000.000	
27	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media komunikasi	300.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	200.000.000	

28	Layanan Hubungan Media	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Massa	30 Media Massa	6.300.000.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Massa	3 Media	530.357.334	
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	120 Peliputan			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan		
29	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum	2 Produk Hukum	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi	1 Regulasi	75.000.000	
30	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	10 Rapat Koordinasi	100.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	50.000.000	
31	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	5 Laporan	50.000.000	
32	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	10 Rapat Koordinasi	100.000.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	50.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	7.205.967.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya E-Government yang dikelola	6 Sumber Daya E-Governm ent	2.905.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	7.733.827.670	
33	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Server yang dikelola	15 Server	1.405.967.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Server yang dikelola	15 Server	1.405.967.000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lisensi	1 Lisensi			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lisensi	1 Lisensi		
						Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	600.000.000	
34	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi	9 Kali	650.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	150.000.000	

		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	2 Dokumen		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	23 Desa	4.902.860.670	
35	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	325.000.000	
36	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	20 Orang	400.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	100.000.000	
37	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OPD	58 OPD	250.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OPD	58 OPD	250.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola	100 Domain dan Sub Domain	4.300.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	4.300.000.000	
38	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	4.300.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	4.300.000.000	

		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps		
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100 Persen	1.450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100 Persen	1.450.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	
39	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	500.000.000	Implementasi Satu Data Indonesia

40	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	136 Peserta	250.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	136 Peserta	250.000.000	Implementasi Satu Data Indonesia
41	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	200.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	200.000.000	Implementasi Satu Data Indonesia
42	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	5 unit	500.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	5 unit	500.000.000	Implementasi Satu Data Indonesia
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.125.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				775.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	1.125.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	775.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	875.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	575.000.000	

43	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	150.000.000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	5 Orang			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang		
44	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	325.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	200.000.000	
45	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	150.000.000	
							Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali		
46	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi Keamanan Informasi	1 Regulasi	150.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi Keamanan Informasi	1 Regulasi	75.000.000	

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	250.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	
47	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	250.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	
	Total				35.782.794.266					32.848.666.543	

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki usulan dari Pemangku Kepentingan tahun 2022.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau

mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara..

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah "Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 2 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 10 Program, yang terdiri dari 5 (lima) Program Rutin dan 5 (lima) Program Kegiatan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi
8. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
9. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dari 10 (sepuluh) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 59 Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun sesuai

dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2021 sebesar **Rp. 25.963.982.200**

- c) Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD tidak ada, semua mengacu kepada Rancangan Awal RKPD
- d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								22.104.850.466
2	1	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,00 Nilai	15.984.481.540			84,00 Nilai	15.723.883.466

2	16	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Dokumen	200.000.000			21 Dokumen	200.000.000
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	100.000.000	APBD		7 Dokumen	100.000.000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	14 Dokumen	100.000.000	APBD		14 Dokumen	100.000.000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	11.006.217.716			2 Laporan	10.745.619.642
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	APBD		984 Orang/Bulan	10.694.925.552
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	311.292.164	APBD		2 Dokumen	311.292.164

2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		4 Dokumen	125.000.000			4 Dokumen	125.000.000
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	125.000.000	APBD		4 Laporan	125.000.000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	150.000.000	APBD		15 Orang	150.000.000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	470.000.000			5 Layanan	470.000.000
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	45 Jenis	100.000.000	APBD		45 Jenis	100.000.000
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	6 Jenis	50.000.000	APBD		6 Jenis	50.000.000

2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	70.000 Lembar	50.000.000	APBD		70.000 Lembar	50.000.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	2.100 Orang/Kali	200.000.000	APBD		2.100 Orang/Kali	200.000.000
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Kab. Kutai Kartanegara	50 Berkas	70.000.000	APBD		50 Berkas	70.000.000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	450.000.000			100 Persen	450.000.000
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	250.000.000	APBD		100 Persen	250.000.000
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	200.000.000	APBD		100 Persen	200.000.000
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	3.001.463.824			12 Bulan	3.001.463.824

2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	5.100.000	APBD		12 Bulan	5.100.000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	742.000.000	APBD		12 Bulan	742.000.000
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	2.254.363.824	APBD		12 Bulan	2.254.363.824
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan				12 Bulan	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		100 Unit	581.800.000			100 Unit	581.800.000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	22 Unit	131.800.000	APBD		22 Unit	131.800.000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000

2	16	1	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	300.000.000	APBD		3 Unit	300.000.000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	2.605.357.334			100 Persen	2.325.000.000
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.334			840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.325.000.000
2	16	2	02.01	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang dibina	Kab. Kutai Kartanegara	58 PPID	300.000.000	APBD		58 PPID	300.000.000
						Jumlah Pengaduan yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	12 Pengaduan		APBD		12 Pengaduan	
2	16	2	02.01	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	Kab. Kutai Kartanegara	30 Laporan	200.000.000	APBD		30 Laporan	200.000.000

2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	120 Konten Video	300.000.000	APBD		120 Konten Video	300.000.000
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	120 konten Streaming				120 konten Streaming	
						Jumlah Konten Radio yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	120 konten Radio				120 konten Radio	
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	120 Orang	250.000.000	APBD		-	-
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara	6 Kali	300.000.000	APBD		6 Kali	300.000.000
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina	Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	300.000.000	APBD		200 Orang	300.000.000

2	16	2	02.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	3 media	200.000.000	APBD		3 media	200.000.000
2	16	2	02.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	Kab. Kutai Kartanegara	3 Media	530.357.334	APBD		3 Media	450.000.000
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Kegiatan		APBD		12 Kegiatan	
2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Regulasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Regulasi	75.000.000	APBD		1 Regulasi	75.000.000
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kali	50.000.000	APBD		5 Kali	100.000.000
2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	50.000.000

2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kali	50.000.000	APBD		5 Kali	50.000.000
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100%	12.033.827.670			100%	6.380.967.000
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government		58 OPD	7.733.827.670			58 OPD	2.080.967.000
2	16	3	02.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	15 Server	1.405.967.000	APBD		15 Server	1.405.967.000
					Jumlah Lisensi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Lisensi			APBD		1 Lisensi	
2	16	3	02.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	600.000.000	APBD	Program dedikasi Visi Misi Kepala Daerah 1. Program DISAPA	-	

2	16	3	02.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	150.000.000
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	Kab. Kutai Kartanegara	23 Desa	4.902.860.670	APBD	Program dedikasi Visi Misi Kepala Daerah 4. Program Pemanjatan Konektivitas Wilayah	-	-
2	16	3	02.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Aplikasi	325.000.000	APBD	Program dedikasi Visi Misi Kepala Daerah 1. Program DISAPA	2 Aplikasi	175.000.000
2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	Kab. Kutai Kartanegara	6 Orang	100.000.000	APBD		6 Orang	100.000.000
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD	Kab. Kutai Kartanegara	58 OPD	250.000.000	APBD	Program dedikasi Visi Misi Kepala Daerah 1. Program DISAPA	58 OPD	250.000.000

2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola		100 Sistem Informasi	4.300.000.000			100 Sistem Informasi	4.300.000.000
2	16	3	02.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	Kab. Kutai Kartanegara	20 OPD	4.300.000.000	APBD	Implementasi Program dedikasi Visi Misi Kepala Daerah	20 OPD	4.300.000.000
				Jumlah Kapasitas Bandwith		Kab. Kutai Kartanegara	400 Mbps	APBD		400 Mbps			
				Jumlah BTS yang dipelihara		Kab. Kutai Kartanegara	22 BTS	APBD		22 BTS			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000				1.450.000.000
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100%	1.450.000.000			100%	1.450.000.000
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58 OPD	1.450.000.000			58 OPD	1.450.000.000

2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	500.000.000	APBD	Implementasi Satu Data Indonesia	1 Dokumen	500.000.000
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	Kab. Kutai Kartanegara	136 Peserta	250.000.000	APBD	Implementasi Satu Data Indonesia	136 Peserta	250.000.000
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Implementasi Satu Data Indonesia	1 Dokumen	200.000.000
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	5 unit	500.000.000	APBD	Implementasi Satu Data Indonesia	5 unit	500.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				775.000.000				700.000.000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		18,97 Persen	775.000.000			18,97 Persen	700.000.000
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		11 OPD	575.000.000			11 OPD	500.000.000

2	21	2	02.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan		1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek		2 Orang				2 Orang	
2	21	2	02.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik		11 OPD	200.000.000			11 OPD	200.000.000
2	21	2	02.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		1 Layanan	150.000.000		Pelaksanaan IKK Persandian	1 Layanan	150.000.000
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI		1 Kali				1 Kali	
2	21	2	02.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Keamanan Informasi		1 Regulasi	75.000.000			-	-

2	2 1	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	200.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000
2	21	2	02.02	0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	200.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000
TOTAL									32.848.666.543	-			26.840.448.540

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD,

RencanaKerja (Renja) PD, RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun

komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. RencanaTindakLanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tenggarong, Juni 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,



Ir. H. BAHTERAMSYAH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620327 198603 1 023

Nama	Jabatan	Paraf
Saifuddin, SE	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	